

## ANALISIS KINERJA KEUANGAN SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) ARIFIN AHMAD PEKANBARU

Gusnardi & Nur Azizah

Prodi Pendidikan Ekonomi Akuntansi Universitas Riau  
e mail : mgusnardi@yahoo.co.id

### *Abstract*

*The purpose of research is to compare the financial performance of general hospitals (Hospital) Arifin Achmad Pekanbaru both before and after referring to the financial accounting area contained in the Ministerial Regulation No. 13 in the country in 2006. Data collection techniques used were interviews and documentation techniques. Data were analyzed using four variables: the ratio of the area of financial independence, effectiveness and efficiency ratio of local revenues, the ratio of the activity, and growth ratios. The results of this study indicate that there are differences in financial performance before and after the application of financial accounting area in general hospitals (Hospital) Arifin Achmad Pekanbaru.. It is evident from the results of the analysis, in which the ratio of the area of financial independence before the issuance of the financial accounting area which decreased after the implementation of accounting and finance areas which increased. PAD-effectiveness ratio was highest in the year 2007 in the amount of 100.44% and the lowest occurred. PAD efficiency ratios ranged from 39.78% to 56.30%. Routine expenditure ratio in 2006 and 2009 ranged from 55.80% to 95.91%, and development spending in 2006 to 2009 ranged from 3.88% to 4.59%. This shows the ratio of budget growing Regional General Hospital Arifin Achmad Pekanbaru in fiscal year 2006 to 2009 showed positive growth despite reduced growth trend.*

*Keywords : financial accounting regional and financial performance*

### **Abstrak**

Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui perbandingan kinerja keuangan rumah sakit umum daerah (RSUD) arifin achmad pekanbaru pada saat sebelum dan sesudah berpedoman kepada akuntansi keuangan daerah yang terdapat pada peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara dan dokumentasi. Data dianalisis dengan menggunakan empat variabel yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas dan efisiensi pendapatan asli daerah, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kinerja keuangan sebelum dan sesudah penerapan akuntansi keuangan daerah pada rumah sakit umum daerah (RSUD) arifin achmad pekanbaru. Hal ini dibuktikan dari hasil analisis, dimana Rasio kemandirian keuangan daerah sebelum diberlakukannya akuntansi keuangan daerah mengalami penurunan dan sesudah diberlakukannya akuntansi keuangan daerah mengalami peningkatan. Rasio efektivitas PAD tertinggi pada tahun 2007 yaitu sebesar 100,44% dan terendah terjadi pada tahun 2008. Rasio efisiensi PAD berkisar antara 39,78% sampai 56,30%. Rasio belanja rutin tahun 2006 sampai 2009 berkisar antara 55,80% sampai 95,91%, dan belanja pembangunan tahun 2006 sampai 2009 yang berkisar antara 3,88% sampai 4,59%. Hal ini menunjukkan Rasio pertumbuhan APBD Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad pekanbaru pada tahun anggaran 2006 sampai 2009 menunjukkan pertumbuhan yang positif meskipun kecenderungan pertumbuhannya berkurang.

Kata kunci : Akuntansi keuangan daerah dan kinerja keuangan

## PENDAHULUAN

Seiring dengan digulirkannya isu reformasi dibidang pemerintahan dan kemudian dikeluarkannya Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara dan pada tahun 2005 pemerintah mengeluarkan PP Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan PP Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang kemudian ditindak lanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Perubahan ini terjadi karena besarnya tuntutan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas terhadap penyelenggaraan jalannya pemerintahan.

Perubahan paradigma ini meliputi penyusunan anggaran berdasarkan pendekatan kinerja, pertanggungjawaban atas penyelenggaraan kegiatan publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah, keterbukaan informasi, dan tuntutan penghindaran dan pembersihan dari kegiatan-kegiatan yang berbau KKN. Tuntutan terhadap akuntabilitas publik berarti pemerintah daerah tidak cukup dengan hanya melakukan *vertikal reporting* berupa penyampaian laporan kepada pemerintah pusat, akan tetapi juga keharusan dalam penyampaian horizontal reporting berupa penyampaian laporan kinerja pemerintah daerah kepada DPRD dan masyarakat luas sebagai wujud dari *horizontal accountability*.

Perubahan-perubahan paradigma tadi menyebabkan tatacara penyelenggaraan keuangan daerah yang telah diterapkan selama ini menjadi tidak relevan lagi. Tuntutan terhadap pertanggungjawaban terhadap penyelenggaraan pelayanan publik tersebut menunjukkan betapa pentingnya laporan keuangan sebagai sebuah informasi yang bukan hanya untuk sekedar laporan biasa tetapi juga akan dijadikan bahan untuk pengambilan keputusan. Bentuk pengambilan keputusan yang paling penting bagi masyarakat adalah apakah pelaksanaan kegiatan publik yang di lakukan oleh pemerintah telah sesuai dengan aspirasi yang di suarakan oleh masyarakat melalui visi dan misi dalam suatu perencanaan strategis secara keseluruhan.

Pengelolaan keuangan daerah sangat besar pengaruhnya terhadap nasib suatu daerah karena daerah dapat menjadi daerah yang kuat dan berkuasa serta mampu mengembangkan kebesarannya atau menjadi tidak berdaya tergantung pada cara mengelola keuangannya. Pengelolaan daerah yang dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif atau memenuhi *value for money* serta partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan keadilan akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya mengurangi jumlah pengangguran serta menurunkan tingkat kemiskinan. Untuk pengelolaan daerah tidak hanya dibutuhkan sumber daya manusia, tetapi juga sumber daya ekonomi berupa keuangan yang dituangkan dalam suatu anggaran pemerintah daerah.

Permendagri No. 13 Tahun 2006 (Bab 1, Pasal 1:37) menyebutkan pengertian kinerja adalah keluaran atau hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kaulitas yang terukur. Anggaran daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Anggaran sebagai instrumen kebijakan dan menduduki posisi sentral harus memuat kinerja, baik untuk penilaian secara internal maupun keterkaitan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya mengurangi pengangguran dan menurunkan tingkat kemiskinan. Kinerja yang terkait dengan anggaran merupakan kinerja keuangan berupa perbandingan antara komponen-komponen

yang terdapat pada anggaran. Kinerja keuangan dalam penelitian ini berupa Rasio kemandirian, Rasio Efektifitas, Rasio efisiensi, Rasio aktifitas, dan Rasio Pertumbuhan (*Growth Ratio*). Dengan adanya rasio-rasio tersebut dapat digunakan untuk mendorong dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Penelitian - penelitian mengenai kinerja keuangan terhadap peraturan pemerintah telah banyak dilakukan salah satunya adalah penelitian yang dilakukan Ratih Wulansari (2007) yang menggunakan alat analisis rasio keuangan daerah untuk mengetahui kinerja keuangan daerah yaitu (1) Rasio kemandirian; (2) Rasio Efektifitas; (3) Rasio efisiensi; (4) Rasio aktifitas; dan (5) Rasio Pertumbuhan (*Growth Ratio*). Penelitian ini menyimpulkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah sebelum dan sesudah otonomi daerah belum dapat dikatakan baik, karena ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat masih tinggi terutama setelah otonomi daerah, belum tercapainya target penerimaan PAD sebelum otonomi daerah, terpusatnya dana APBD pada belanja rutin dibandingkan pada belanja pembangunan.

Besarnya harapan kepada pemerintah untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang baik (*Good Governance*), mengharuskan pemerintah untuk secara positif melakukan perbaikan-perbaikan di dalam tubuh pemerintahan sendiri. Sebagai salah satu alat yang dapat di gunakan untuk mencapai maksud tersebut, Akuntansi pemerintah harus pula mengikuti perubahan-perubahan yang telah berlangsung. Beberapa perbaikan harus segera di lakukan untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Aspek yang perlu direformasi adalah terkait dengan perlunya dibuat standar akuntansi keuangan pemerintah daerah, perubahan bertahap akhirnya menjadi *accrual basis* atau *modified accrual basis*, dan penguatan audit pemerintah daerah yang terdiri dari audit keuangan.

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang dikemukakan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perbandingan Kinerja Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Arifin Ahmad Pekanbaru pada saat sebelum dan sesudah berpedoman kepada Akuntansi Keuangan Daerah yang terdapat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

## TINJAUAN TEORITIS

### Akuntansi Keuangan Daerah

Berdasarkan aktivitas ekonominya itu, maka tidak dapat dielakkan bila lembaga pemerintah juga membutuhkan jasa akuntansi, baik untuk meningkat mutu pengawasan, maupun untuk menghasilkan informasi keuangan yang akan digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Menurut Elizabeth (2008) Akuntansi adalah suatu sistem informasi yang kegiatannya terdiri atas pengumpulan data keuangan suatu unit organisasi dan pengkomunikasian hasilnya kepada berbagai pihak yang berkepentingan untuk mengambil keputusan ekonomi. Sedangkan menurut Accounting Principles Board (1970), dalam Abdul Halim (2004) menyebutkan bahwa Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa yang fungsinya menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan tentang entitas ekonomi yang dimaksudkan agar berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi dalam membuat pilihan-pilihan yang nalar diantara berbagai alternatif arah tindakan.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa informasi akuntansi diharapkan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi dengan cara mencatat, menggolongkan, dan pengikhtisaran transaksi yang bersifat keuangan dalam bentuk laporan keuangan.

Pada dasarnya pengertian Keuangan Negara sama dengan keuangan daerah perbedaan antara keuangan Negara dengan keuangan daerah adalah meliputi semua aspek kekayaan Negara (*treasure*). Sedangkan keuangan daerah hanya meliputi pengelolaan keuangan saja. Pengelolaan keuangan berkaitan dengan perencanaan dari anggaran daerah.

Pengertian keuangan daerah sebagaimana dimuat dalam penjelasan pasal 156 ayat 1 undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan daerah adalah sebagai berikut: "keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut".

Sedangkan menurut Memesah dalam Halim (2004) menyebutkan bahwa keuangan daerah adalah Semua hak dan kewajiban yang dapat di nilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh Negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku.

### **Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Permendagri No. 13 Tahun 2006 (Bab 1, Pasal 1:37) menyebutkan pengertian kinerja adalah keluaran atau hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kaulitas yang terukur.

Pengertian kinerja menurut Mahsun (2006) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan / program / kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Dari pengertian tersebut, kinerja menekankan apa yang dihasilkan dari fungsi-fungsi suatu pekerjaan. Bila disimak lebih lanjut apa yang terjadi dalam sebuah pekerjaan adalah suatu proses yang mengolah input menjadi output (hasil kerja). Penggunaan indikator kunci untuk mengukur hasil kerja individu, bersumber dari fungsi-fungsi yang diterjemahkan dalam kegiatan/tindakan dengan landasan standar yang jelas dan tertulis.

### **Indikator Kinerja**

Indikator kinerja adalah suatu variabel yang digunakan untuk mengekspresikan secara kuantitatif efektivitas dan efisiensi proses atau operasi dengan berpedoman pada target-target dan tujuan organisasi. Indikator kinerja suatu organisasi hendaknya dapat dipahami secara sama, baik oleh manajemen maupun stakeholders (Hessel Nogi;2005). Dengan indikator yang sama dan persepsi yang sama maka penilaian keberhasilan diharapkan menggunakan kriteria yang sama sehingga lebih objektif. Jadi dengan adanya indikator yang jelas diharapkan akan menciptakan konsensus berbagai pihak, baik internal maupun eksternal untuk menghindari kesalahan interpretasi selama pelaksanaan program dan dalam menilai keberhasilan suatu instansi pemerintah.

Abdul Halim (2004) menyebutkan terdapat beberapa alat analisis rasio didalam pengukuran kinerja keuangan daerah yang dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD adalah sebagai berikut:

### 1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah (Otonomi Fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembanguana dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman.

$$\text{Rasio Kemandirian Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Penerimaan Daerah}} \times 100\%$$

Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang berasal dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan milik daerah serta lain-lain pendapatan yang sah. Total Penerimaan Daerah merupakan jumlah dari seluruh penerimaan salam satu tahun anggaran.

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi.

### 2. Rasio Efektifitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Realisasi Penerimaan PAD merupakan perwujudan dari besarnya anggaran yang sudah ditetapkan berdasarkan kemampuan rasional. Target Penerimaan PAD merupakan anggaran besarnya pajak daerah yang ingin dicapai dalam satu tahun anggaran dan ditetapkan berdasarkan kemampuan rasional yang dapat dicapai.

PAD efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 100%. Namun demikian, semakin besar rasio efektifitas menggambarkan kinerja pemerintah semakin baik. Guna memperoleh ukuran yang lebih baik, rasio efektifitas tersebut perlu diperbandingkan dengan rasio efisiensi yang dicapai pemerintah daerah.

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 atau dibawah 100%. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah semakin baik.

### 3. Rasio Aktivitas

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Secara sederhana, rasio keserasian itu dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Rutin APBD} = \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Pembangunan APBD} = \frac{\text{Total Belanja Pembangunan}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$$

Belanja Rutin merupakan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok pelayanan masyarakat yang terdiri dari belanja barang, pemeliharaan, perjalanan dinas, pengeluaran tidak termasuk bagian lain dan pengeluaran tidak tersangka serta belanja lain-lain. Sedangkan Belanja Pembangunan merupakan pengeluaran daerah dalam bentuk belanja barang modal.

Kedua rasio ini mempunyai hubungan yang terbalik artinya jika Rasio Belanja Rutin besar maka Rasio Belanja Pembangunan akan kecil yang berarti bahwa pengeluaran pemerintah daerah sebagian besar hanya pada belanja rutin tidak pada belanja pembangunan daerah dan sebaliknya (Halim, 2004). Rasio aktivitas yang akan digunakan hanyalah Rasio Aktivitas Belanja Pembangunan saja dengan alasan rasio ini yang dianggap paling signifikan berubah sesudah pelaksanaan otonomi daerah.

Belum ada patokan yang pasti berapa besarnya rasio belanja rutin maupun pembangunan terhadap APBD yang ideal, karena sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan. Namun demikian sebagai daerah dinegara berkembang peranan pemerintah daerah untuk memacu pelaksanaan pembangunan masih relatif besar. Oleh karena itu, rasio belanja pembangun yang relatif masih kecil perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan di daerah.

Secara umum aktivitas pemerintah daerah dapat dinilai dari alokasi (rasio) belanja yang muncul dalam anggaran, baik untuk belanja rutin, maupun untuk belanja pembangunan. Kedua rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah mengalokasikan belanja daerahnya, semakin kecil persentase dana yang dialokasikan terhadap belanja rutin berarti akan semakin besar persentase dana belanja pembangunan yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat, dan sebaliknya ([www.sleman.go.id](http://www.sleman.go.id)). Rasio ini juga menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal (Halim, 2001).

### 4. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan (*growth ratio*) mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapatkan perhatian. Formula rasio ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Pertumbuhan PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD } X_{n-1}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Pertumbuhan Pendapatan} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan } X_{n-1}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Pertumbuhan Belanja Rutin} = \frac{\text{Realisasi Belanja Rutin } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi Belanja Rutin } X_{n-1}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Pertumbuhan Belanja Pembangunan} = \frac{\text{Realisasi Belanja Pembangunan } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi Belanja Pembangunan } X_{n-1}} \times 100\%$$

keterangan :

$X_n$  = Tahun yang dihitung

$X_{n-1}$  = Tahun Sebelumnya

### Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian mengenai kinerja keuangan terhadap peraturan pemerintah telah banyak dilakukan diantaranya adalah penelitian yang dilakukan Ratih Wulansari (2007) yang menggunakan alat analisis rasio keuangan daerah untuk mengetahui kinerja keuangan daerah yaitu (1) Rasio kemandirian; (2) Rasio Efektifitas; (3) Rasio efisiensi; (4) Rasio aktifitas; dan (5) Rasio Pertumbuhan (*growth Ratio*). Penelitian ini menyimpulkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah sebelum dan sesudah otonomi daerah belum dapat dikatakan baik, karena ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat masih tinggi terutama setelah otonomi daerah, belum tercapainya target penerimaan PAD sebelum otonomi daerah, terpusatnya dana APBD pada belanja rutin dibandingkan pada belanja pembangunan.

Penelitian yang dilakukan Mhd Karya Satya Azhar (2008) menggunakan metode statistik untuk sampel yang dipasangkan (*paired t-test*). Hasil-hasil secara umum menunjukkan keberadaan perbedaan-perbedaan penting dalam pencapaian kinerja keuangan sebelum dan sesudah otonomi daerah. Kinerja keuangan yang diukur lewat desentralisasi fiskal, upaya fiskal, dan tingkat kemandirian pembiayaan memiliki perbedaan-perbedaan, namun untuk tingkat efisiensi penggunaan anggaran tidak memiliki perbedaan yang signifikan.

Sri Haryati (2006), meneliti tentang perbandingan kinerja keuangan daerah sebelum dan sesudah kebijakan otonomi daerah. Peneliti menggunakan rasio-rasio dalam kinerja keuangan setempat yaitu : tingkat kemandirian fiskal, kebutuhan fiskal, kapasitas fiskal dan upaya fiskal. Hasil kinerja keuangan mengalami penurunan persentase pada pengukuran derajat kemandirian fiskal, kebutuhan fiskal dan upaya fiskal setelah diberlakukannya otonomi daerah. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan setempat sebelum otonomi daerah lebih baik dari pada setelah diberlakukannya.

Suranto dan Muharomi Andri (2009) meneliti tentang Perubahan Kemampuan Kinerja Keuangan Pemerintah dengan menggunakan metode dan analisis kualitatif yaitu meliputi analisis rasio kemandirian keuangan daerah, analisis derajat desentralisasi fiskal, analisis rasio indeks kemampuan rutin, analisis rasio keserasian/aktivitas dan analisis rasio pertumbuhan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Rasio Kemandirian keuangan daerah pada masa sebelum otonomi daerah lebih tinggi dari pada setelah diberlakukannya otonomi daerah. Rasio derajat desentralisasi fiskal pada saat sebelum otonomi daerah juga lebih tinggi daripada setelah otonomi daerah. Sedangkan dilihat dari rasio indeks kemampuan rutin, sebelum otonomi daerah lebih rendah dibanding setelah diberlakukannya

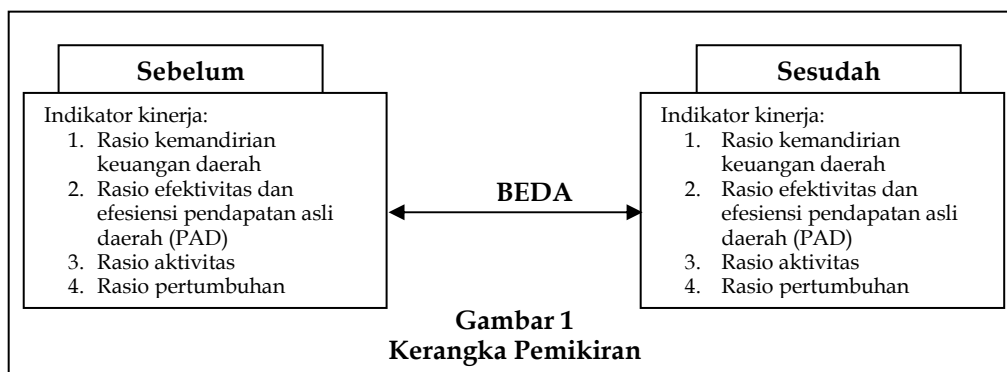
otonomi daerah. Rasio aktivitas setelah otonomi daerah menunjukkan nilai yang lebih tinggi daripada sebelum otonomi daerah. Sedangkan rasio pertumbuhan mempunyai pertumbuhan yang lebih baik pada saat sesudah otonomi daerah daripada sebelum otonomi daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Kusumawati dan Chotifah Dyah Anggar (2007) yang menganalisis kinerja keuangan daerah terhadap derajat kemandirian fiskal, kebutuhan fiskal, kapasitas fiskal dan upaya fiskal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pemerintah masih rendah Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam memenuhi kebutuhan fiskalnya, pemerintah masih memerlukan subsidi dari pemerintah pusat sehingga perlu diadakan usaha untuk peningkatan pendapatan asli daerah.

### Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah dan landasan teori yang telah dikemukakan maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut “Terdapat perbedaan yang signifikan pada kinerja keuangan sebelum dan sesudah penerapan akuntansi keuangan daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Arifin Ahmad Pekanbaru.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan maka kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat dilihat dalam Gambar 1.



## METODE PENELITIAN

### Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan mengumpulkan data dari Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Pekanbaru. Pengumpulan Data dilakukan dengan cara : 1) Wawancara dengan bagian akuntansi mengenai hal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yaitu tentang akuntansi keuangan daerah dan datanya mengenai laporan keuangan, 2) Dokumentasi yaitu dengan mempelajari dokumen atau laporan keuangan yang diterima dari bagian pembukuan berupa Neraca, laporan realisasi anggaran, catatan atas laporan keuangan dan sebagainya sesuai dengan yang dibutuhkan.

### Operasional Variabel Penelitian

Kinerja keuangan merupakan keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang dicapai dari kegiatan atau program yang dicapai sesuai dengan anggaran



dengan kualitas dan kuantitas yang terukur. Untuk mengetahui Operasional Variabel kinerja keuangan pemerintah daerah seperti dalam Tabel 1.

**Teknik Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu membandingkan antara data yang telah dikumpulkan dengan teori - teori yang relevan dan kemudian diambil atau ditarik suatu kesimpulan dan saran.

Penelitian ini juga menggunakan analisis kuantitatif. Pengukuran kinerjanya masing-masing rasio keuangan seperti dalam tabel berikut ini.

**Tabel 1**  
**Operasional Variabel Penelitian**

Variabel	Konsep Variabel	Indikator	Skala
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	Rasio keuangan daerah menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.	<b>Rasio Kemandirian =</b>	Rasio
Rasio Efektifitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rasio efektifitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.	<b>Rasio Efektifitas =</b>  <b>Rasio Efektifitas =</b>	Rasio
Rasio Aktivitas	Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal	<b>Rasio Belanja Rutin APBD =</b>  <b>Rasio Belanja Pembangunan APBD =</b>	Rasio
Rasio Pertumbuhan	Rasio pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya.	<b>Rasio Pertumbuhan PAD =</b> <b>Rasio Pertumbuhan Pendapatan =</b> <b>Rasio Pertumbuhan Belanja Rutin =</b> <b>Rasio Pertumbuhan Belanja Pembangunan =</b>	Rasio

Sumber: Abdul Halim (2004)

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Rasio Kemandirian Keuangan Daerah**

Kemandirian keuangan daerah di tunjukkan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah di bandingkan dengan penerimaan daerah di bandingkan dengan penerimaan daerah. Formula yang digunakan untuk mengukur kemandirian keuangan daerah adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Kemandirian Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Penerimaan Daerah}} \times 100\%$$

**Tabel 2**  
**Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan**

Keterangan	Tahun	Pendapatan asli daerah (Rp)	Total penerimaan daerah (Rp)	Rasio kemandirian keuangan daerah (%)
1	2	3	4	5=3/4
<b>Sebelum</b>	2006	28.048.217.000	174.211.756.843	16.10
	2007	30.036.126.000	216.921.884.755	13.84
<b>Sesudah</b>	2008	31.216.605.780	144.468.691.708	21.60
	2009	32.790.509.780	135.819.097.481	24.14

Sumber : Laporan Keuangan RSUD

Dari tabel 2 terlihat bahwa secara riil kemandirian keuangan daerah RSUD arifin ahmad dalam mencukupi kebutuhan pembiayaan untuk melakukan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial sudah meningkat. Rasio kemandirian keuangan RSUD Arifin Ahmad berkisar antara 13.84% sampai 24.14%, artinya pola hubungan yang instruktif, dimana peranan pemerintah pusat lebih rendah.

Dari tabel tersebut dapat diketahui rasio kemandirian keuangan daerah selama 2 (dua) tahun sebelum diberlakukannya akuntansi keuangan daerah yaitu tahun 2006-2007 mengalami penurunan yaitu 16.10% menjadi 13.84% dan sesudah diberlakukannya akuntansi keuangan daerah yaitu tahun 2008-2009 mengalami peningkatan yaitu 21.60% menjadi 24.14%. Hal ini menunjukkan peningkatan kinerja keuangan RSUD arifin ahmad pekanbaru sesudah diberlakukannya akuntansi keuangan daerah menunjukkan peningkatan.

Kemandirian keuangan daerah (Otonomi Fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembanguna dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi.

### **Rasio Efektifitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

#### **Rasio Efektivitas**

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugasnya dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 100%. Namun demikian, semakin besar rasio efektivitas menggambarkan kinerja pemerintah yang semakin baik. Formula yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Realisasi penerimaan PAD merupakan perwujudan dari besarnya anggaran yang sudah ditetapkan berdasarkan kemampuan rasional. Target penerimaan PAD merupakan anggaran besarnya pajak daerah yang ingin dicapai dalam satu tahun anggaran dan ditetapkan berdasarkan kemampuan rasional yang dapat dicapai. Pengukuran kinerja RSUD Arifin Ahmad menggunakan rasio efektifitas sebelum dan sesudah diberlakukannya akuntansi keuangan daerah tersedia dalam tabel :

**Tabel 3**  
**Perhitungan Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah**

Keterangan	Tahun	Realisasi Penerimaan (PAD)	Target Penerimaan (PAD)	Rasio Efektifitas (PAD) %
1	2	3	4	5=3/4
Sebelum	2006	28.168.211.000	28.048.217.000	100.42
	2007	30.169.706.911	30.036.126.000	100.44
Sesudah	2008	26.075.888.945	31.216.605.780	83.53
	2009	32.062.630.630	32.790.509.780	97.78

Sumber : Laporan Keuangan RSUD

Dari tabel 3 dapat diketahui bahwa rasio efektifitas PAD rumah sakit umum daerah (RSUD) Arifin ahmad pekanbaru tahun 2006 sampai 2009 berkisar antara 83.53% sampai 100.44%. hal ini menunjukkan bahwa kinerja yang dilakukan belum efektif. PAD efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 100%. Rasio efektifitas PAD tertinggi pada tahun 2007 yaitu sebesar 100.44% dan terendah terjadi pada tahun 2008 sebesar 83.53%.

Rasio efektifitas tersebut perlu dibandingkan dengan rasio efisiensi yang dicapai pemerintah daerah. Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 atau dibawah 100%. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah semakin baik.

### Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 atau dibawah 100%. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah semakin baik. Formula yang digunakan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja RSUD arifin ahmad menggunakan rasio efisiensi sebelum dan sesudah diberlakukannya akuntansi keuangan daerah tersedia dalam tabel4.

Dari tabel 4 dapat diketahui bahwa rasio efisiensi PAD rumah sakit umum daerah (RSUD) arifin ahmad pekanbaru tahun 2006 sampai 2009 dapat dikatakan baik, yaitu berkisar antara 39.78% sampai 56.30%. Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dapat dikatakan efisien apabila rasio yang dicapai dibawah 100%.

**Tabel 4**  
**Perhitungan Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah**

Keterangan	Tahun	Biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD	Realisasi penerimaan PAD	Rasio efisiensi (%)
1	2	3	4	5 = 3/4
Sebelum	2006	11.206.588.000	28.168.211.000	39.78
	2007	16.988.410.000	30.169.706.911	56.30
Sesudah	2008	10.857.811.000	26.075.888.945	41.63
	2009	14.066.685.000	32.062.630.630	43.87

Sumber: Laporan Keuangan RSUD

Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah semakin baik. Efisiensi tertinggi terjadi pada tahun 2006 yaitu 39.78% dan terendah terjadi pada tahun 2007 yaitu sebesar 56.30%. hal ini menunjukkan bahwa kinerja RSUD arifin ahmad pekanbaru telah melakukan efisiensi anggaran dan menggambarkan kinerja yang baik.

### Rasio Aktivitas

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Secara sederhana, rasio keserasian itu dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Rutin APBD} = \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Pembangunan APBD} = \frac{\text{Total Belanja Pembangunan}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$$

Belanja Rutin merupakan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok pelayanan masyarakat yang terdiri dari belanja barang, pemeliharaan, perjalanan dinas, pengeluaran tidak termasuk bagian lain dan pengeluaran tidak tersangka serta belanja lain-lain. Sedangkan Belanja Pembangunan merupakan pengeluaran daerah dalam bentuk belanja barang modal.

Kedua rasio ini mempunyai hubungan yang terbalik artinya jika Rasio Belanja Rutin besar maka Rasio Belanja Pembangunan akan kecil yang berarti bahwa pengeluaran pemerintah daerah sebagian besar hanya pada belanja rutin tidak pada belanja pembangunan daerah dan sebaliknya (Halim, 2004). Rasio aktivitas yang akan digunakan hanyalah Rasio Aktivitas Belanja Pembangunan saja dengan alasan rasio ini yang dianggap paling signifikan berubah sesudah pelaksanaan otonomi daerah.

**Tabel 5**  
**Perhitungan Rasio belanja rutin terhadap APBD RSUD**

Keterangan	Tahun	Total belanja rutin	Total APBD	Rasio belanja rutin terhadap APBD (%)
1	2	3	4	5 = 3/4
Sebelum	2006	104.733.429.328	174.211.756.843	60.11
	2007	121.060.504.691	216.921.884.755	55.80
Sesudah	2008	123.158.271.054	144.468.691.708	85.24
	2009	130.277.221.459	135.819.097.481	95.91

Sumber: Laporan Keuangan RSUD

Dari tabel 5 dapat dilihat rasio belanja rutin tahun 2006 sampai 2009 berkisar antara 55,80% sampai 95,91%, Belum ada patokan yang pasti berapa besarnya rasio belanja rutin maupun pembangunan terhadap APBD yang ideal, karena sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan. Namun demikian sebagai daerah dinegara berkembang peranan pemerintah daerah untuk memacu pelaksanaan pembangunan masih relatif besar.

**Tabel 6**  
**Perhitungan Rasio belanja pembangunan terhadap APBD**

Keterangan	Tahun	Total belanja pembangunan	Total APBD	Rasio belanja pembangunan terhadap APBD
1	2	3	4	5 = $\frac{3}{4}$
Sebelum	2006	7.561.764.320	174.211.756.843	<b>4.34</b>
	2007	9.961.673.848	216.921.884.755	<b>4.59</b>
Sesudah	2008	5.608.953.400	144.468.691.708	<b>3.88</b>
	2009	5.283.382.300	135.819.097.481	<b>3.89</b>

Sumber: Laporan Keuangan RSUD

Dari 6 di atas dapat dilihat rasio belanja rutin tahun 2006 sampai 2009 berkisar antara 55,80% sampai 95,91%, dan belanja pembangunan tahun 2006 sampai 2009 yang berkisar antara 3.88% sampai 4.59%. hal ini menunjukkan bahwa rasio aktivitas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Arifin Achmad belum optimal. Karena belanja rutin lebih besar dari belanja pembangunan. Kedua rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah mengalokasikan belanja daerahnya, semakin kecil persentase dana yang dialokasikan terhadap belanja rutin berarti akan semakin besar persentase dana belanja pembangunan yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat, dan sebaliknya ([www.sleman.go.id](http://www.sleman.go.id)). Rasio ini juga menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal (Halim, 2001).

### Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan (*growth ratio*) mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapatkan perhatian.

Dari tabel 7 menunjukkan pertumbuhan yang positif meskipun kecenderungan pertumbuhannya berkurang. Pada Pendapatan Asli Daerah PAD dan Belanja Rutin, pertumbuhannya cenderung meningkat meskipun relatif kecil. Sedangkan pada Total Pendapatan dan Belanja Pembangunan, pertumbuhannya cenderung menurun. Rasio Pertumbuhan rata-rata tidak stabil artinya adanya kenaikan dan penurunan, namun kinerja keuangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Arifin Achmad Pekanbaru mempunyai perkembangan kinerja yang positif walaupun masih relatif kecil.

**Table 7**  
**Rasio Pertumbuhan APBD RSUD Arifin Achmad Pekanbaru tahun 2006-2009**

No	Keterangan	Sebelum		Sesudah	
		2006	2007	2008	2009
1	Pendapatan asli daerah	28.048.217.000	30.036.126.000	31.216.605.780	32.790.509.780
2	Pertumbuhan PAD	-	7,08%	3,93%	5,04%
3	Total pendapatan	174.211.756.843	216.921.884.755	144.468.691.708	135.819.097.481
4	Pertumbuhan pendapatan	-	24,51%	(33,40%)	(5,98%)
5	Belanja rutin	104.733.429.328	121.060.504.691	123.158.271.054	130.277.221.459
6	Pertumbuhan belanja rutin	-	15,58%	1,73%	5,78%
7	Belanja pembangunan	7.561.764.320	9.961.673.848	5.608.953.400	5.283.382.300
8	Pertumbuhan belanja pembangunan	-	31,73%	(43,69%)	(5,80%)

Sumber: Laporan Keuangan RSUD

### SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Rasio kemandirian keuangan daerah sebelum diberlakukannya akuntansi keuangan daerah mengalami penurunan dan sesudah diberlakukannya akuntansi keuangan daerah mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan peningkatan kinerja keuangan RSUD Arifin Achmad pekanbaru sesudah diberlakukannya akuntansi keuangan daerah mengalami peningkatan.
2. Rasio efektivitas PAD tertinggi pada tahun 2007 dan terendah terjadi pada tahun 2008. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja yang dilakukan belum efektif. PAD efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 100%.
3. Rasio efisiensi PAD Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Pekanbaru tahun 2006 sampai 2009 dapat dikatakan baik, yaitu berkisar antara 39,78% sampai 56,30%. Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dapat dikatakan efisien apabila rasio yang dicapai dibawah 100%.
4. Rasio belanja rutin tahun 2006 sampai 2009 berkisar antara 55,80% sampai 95,91%, dan belanja pembangunan tahun 2006 sampai 2009 yang berkisar antara 3,88% sampai 4,59%. Hal ini menunjukkan bahwa rasio aktivitas RSUD Arifin Achmad belum optimal. Karena belanja rutin lebih besar dari belanja pembangunan.
5. Rasio pertumbuhan APBD Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad pekanbaru pada tahun anggaran 2006 sampai 2009 menunjukkan pertumbuhan yang positif meskipun kecenderungan pertumbuhannya berkurang.
6. Rasio pertumbuhan rata-rata tidak stabil artinya adanya kenaikan dan penurunan, namun kinerja keuangan RSUD Arifin Achmad Pekanbaru mempunyai perkembangan kinerja yang positif walaupun masih relatif kecil.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hafiz. 2008. *Akuntansi Pemerintahan Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat.
- \_\_\_\_\_ 2004. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit dan Percetakan Akademi Menejemen Perusahaan YKPN.
- Indra Bastian. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Kusumawati, Chotifah Dyah Anggar, 2007. Analisis Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Menghadapi Otonomi Daerah Ditinjau Dari Aspek Keuangan (Studi Empiris Pada Wilayah Karisidenan Surakarta). *Tesis*. Universitas Muhammadiyah Surakarta (Belum di Publikasi).
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mhd Karya Satya Azhar, 2008. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sebelum Dan Sesudah Otonomi Daerah. *Tesis*. Department Akuntansi Sekolah Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi, Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Nogi, Hessel. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta : Penerbit PT Grasindo.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. 2005. *Standar Akuntansi Pemerintah*. Bandung: Penerbit Fokus Media.
- Peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006. 2006. Pedoman pengelolaan keuangan daerah.
- Ratih Wulansari, 2007. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan Sebelum Dan Sesudah Otonomi Daerah. *Jurnal dan Ekonomi*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Suranto, Muharomi Andri, 2009. Analisis Perubahan Kemampuan Kinerja Keuangan Pemerintah Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah Di Kabupaten Karanganyar. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta (Belum di Publikasi).
- <http://id.wikipedia.org> Indonesia, W. 2008. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah : Diakses Pada Tanggal 04 Mei 2011
- <http://www.scribd.com/doc/50364736/5/A-Pengertian-Keuangan-Daerah>: diakses pada tanggal 19 agustus 2011.